

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan suatu daerah merupakan salah satu tindakan guna mewujudkan tujuan negara dalam bidang perekonomian berupa kemakmuran. Untuk mewujudkannya diperlukan syarat-syarat yang harus terpenuhi, misalnya pemerataan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam secara maksimal, lapangan pekerjaan terbuka luas, mengurangi kemiskinan, sarana dan prasarana transportasi yang menjangkau hingga ke daerah-daerah, pemerataan pendidikan dan kesehatan. Dilihat dari sisi ilmu ekonomi, pembangunan berarti suatu upaya agar suatu negara dapat memperbanyak output yang lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduknya, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita yang berkelanjutan (Todaro, 2011).

Secara sederhana pembangunan berarti adanya peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk suatu negara secara berkelanjutan. Sedangkan dalam lingkup daerah biasa disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sedangkan PDRB perkapita berarti PDRB dibagi dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil dilihat dari beberapa indikator misalnya adanya pertumbuhan ekonomi dan disparitas ekonomi yang menurun.

PDRB yaitu keseluruhan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh semua unit produksi dalam jangka waktu dan di suatu daerah tertentu. PDRB dapat menjadi indikator pertumbuhan ekonomi dengan melihat perbedaan pendapatan dari tahun-tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan harga konstan dan harga berlaku. Perekonomian dikatakan tumbuh jika terjadi peningkatan pendapatan dari tahun sebelumnya. Namun jumlah penduduk juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dengan PDRB tinggi disuatu daerah bukan berarti tingkat kesejahteraannya tinggi. Jumlah penduduk yang tinggi akan mempengaruhi PDRB per kapita menjadi rendah.

Setiap daerah tentunya memiliki perbedaan potensi sumber daya alam yang dihasilkan oleh suatu daerah yang selanjutnya akan mempengaruhi hasil produksi masing-masing daerah. Ada daerah yang mampu memproduksi suatu komoditas dengan harga yang rendah dan ada yang harus membayarnya dengan harga yang relatif mahal. Hal inilah yang selajutnya memngakibatkan adanya daerah yang mampu untuk cepat tumbuh, cepat berkembang serta mengalami pertumbuhan yang lambat.

Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah diberikan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Maka, pemerintah daerah dituntut agar mampu memaksimalkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Di provinsi DIY sendiri, terdiri atas satu kota dan empat kabupaten. Dan dari masing-masing kabupaten/kota tersebut tentunya memiliki keadaan geografis yang berbeda yang menyebabkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota juga berbeda, sehingga memiliki PDRB yang berbeda-beda sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 1.1.
PDRB, Laju Pertumbuhan PDRB, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2015

Kabupaten/Kota	PDRB (Juta Rupiah)	Laju PDRB (%)	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (km ²)
Yogyakarta	22412175,7	5,16	412704	32,50
Bantul	15610514	5,00	971511	506,85
Sleman	28159673,9	5,31	1167481	574,82
Kulonprogo	6281795,8	4,62	412198	586,27
Gunungkidul	11151687,9	4,81	715282	1485,36
DIY	83461574	4,98	3679176	3185,80

Sumber : Badan Pusat Statistik DIY 2016

Tabel di atas memperlihatkan PDRB, laju pertumbuhan PDRB, jumlah penduduk dan luas setiap kabupaten/kota di provinsi DIY. Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk 412704 jiwa dan luas wilayah 32,50 km² memiliki PDRB sebesar Rp 22412175,7 juta. Kabupaten Bantul dengan jumlah penduduk 971511 jiwa dan luas wilayah 506,85 km² memiliki PDRB sebesar Rp 15610514 juta. Kabupaten Sleman dengan jumlah penduduk 1167481 jiwa dan luas wilayah 574,82 km² memiliki PDRB sebesar Rp 28159673,9 juta. Kabupaten Kulonprogo dengan jumlah penduduk 412198 jiwa dan luas wilayah 586,27 km² memiliki PDRB sebesar Rp 6281795,8 juta. Dan kabupaten Gunungkidul dengan jumlah

penduduk 715282 jiwa dan luas wilayah 1485,36 km² memiliki PDRB sebesar Rp 11151687,9 juta. Kabupaten/kota dengan PDRB dan laju pertumbuhan PDRB tertinggi adalah kabupaten Sleman. Sementara itu, kabupaten/kota dengan PDRB dan laju pertumbuhan PDRB terendah adalah kabupaten Kulonprogo.

Hal tersebut membutuhkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah DIY dan khususnya adalah Pemerintah Kabupaten Kulonprogo. Pembangunan ekonomi perlu direncanakan kembali sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh kabupaten Kulonprogo. Untuk itu, penting adanya pembangunan ekonomi dengan mengetahui sektor-sektor basis yang dimiliki oleh setiap kabupaten/kota, struktur perekonomian kabupaten/kota, klasifikasi kabupaten/kota berdasarkan typologi klassen, ketimpangan antar kabupaten/kota dan kecepatan pertumbuhan sektor-sektor perekonomian yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota agar pemerintah masing-masing kabupaten/kota dapat menentukan kebijakan ekonomi yang tepat. Berikut adalah data struktur perekonomian kabupaten/kota di DIY tahun 2015.

Tabel 1.2.
Struktur Ekonomi Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2015 Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010

Sektor	Yogyakarta	Bantul	Sleman	Kulonprogo	Gunungkidul
Pertanian	36.053	1.961.983	2.014.728,90	1.143.120	2.557.403
Pertambangan	851	102.423	115.517,40	91.993	161.383
Industri Pengolahan	2.995.839	2.276.303	3.584.504,40	776.909	1.035.144
Pengadaan Listrik	48.690	22.798	32.369,20	5.834	10.375
Pengadaan Air	32.798	13.022	13.445,40	8.524	17.940
Konstruksi	1.740.508	1.526.241	3.117.439,50	531.260	1.036.793
Perdagangan	1.552.645	1.315.611	2.132.734,90	849.656	1.038.835

Transportasi	870.914	774.382	1.783.984,40	531.194	582.658
Penyediaan Akomodasi	2.596.750	1.646.727	2.746.288,40	231.152	635.346
Informasi dan Komunikasi	3.041.922	1.536.407	2.914.483,00	398.651	1.011.120
Jasa Keuangan	1.374.111	423.450	860.349,50	189.970	239.629
Real Estate	2.089.602	1.057.942	2.336.477,30	226.908	393.200
Jasa Perusahaan	278.212	87.194	552.150,30	20.889	56.663
Administrasi Pemerintahan	2.019.480	1.063.245	1.702.107,90	513.345	988.812
Jasa Pendidikan	2.231.520	1.157.438	2.893.218,80	405.420	744.845
Jasa Kesehatan	879.119	302.837	690.675,40	97.500	239.841
Jasa lainnya	623.162	342.511	669.199,20	259.240	401.692

Sumber : Badan Pusat Statistik DIY 2016

Berdasarkan data di atas, dapat kita ketahui bahwa sektor industri pengolahan mendominasi struktur perekonomian kota Yogyakarta tahun 2015 dengan Rp 2995839 juta. Kabupaten Bantul dan Sleman struktur perekonomiannya juga didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan Rp 2276303 juta dan Rp 3584504,4 juta. Serta untuk struktur perekonomian kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul didominasi oleh sektor pertanian dengan Rp 1143120 juta dan Rp 2557403 juta. Itu berarti bahwa kota Yogyakarta, kabupaten Bantul dan kabupaten Sleman struktur perekonomiannya telah bergeser ke sektor sekunder yaitu industri pengolahan. Sementara itu, untuk kabupaten Kulonprogo dan kabupaten Gunungkidul struktur perekonomiannya masih tergantung pada sektor primer yaitu pertanian.

Menurut Lincoln Arsyad (Arsyad, 1999), tujuan terpenting dari adanya pembangunan ekonomi daerah adalah agar meningkatnya jumlah kesempatan kerja untuk penduduk daerah itu sendiri. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, baik pemerintah maupun masyarakat daerah harus saling bekerjasama

dan mendukung dalam mengambil inisiatif pembangunan ekonomi daerah. Inisiatif tersebut dapat dilakukan dengan berupaya untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang ada. Potensi daerah yang berbeda akan berdampak pada model pembangunan yang ditetapkan dan berhasil pada suatu daerah yang belum tentu bermanfaat juga bagi daerah lain. Kebijakan yang diambil dalam proses pembangunan suatu daerah haruslah sesuai dengan kondisi daerah tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka untuk mendapatkan data serta informasi yang dapat bermanfaat dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan suatu daerah tersebut, analisis yang mendalam terkait dengan keadaan suatu daerah harus dilakukan.

Dengan melihat data dan fakta di atas serta pentingnya masalah pembangunan ekonomi terkait dengan pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan sektor unggulan tiap kabupaten/kota di DIY, maka penulis mengambil judul dalam skripsi ini yaitu : **“ANALISIS POTENSI EKONOMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN (DIY) TAHUN 2012-2015”**.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini akan terfokus menganalisis mengenai pertumbuhan ekonomi, sektor unggulan, klasifikasi perekonomian, sektor-sektor yang kompetitif dan kecepatan pertumbuhan sektor perekonomian yang ada di kota

Yogyakarta, kabupaten Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidul pada tahun 2012-2015 dengan variabel yang digunakan yaitu PDRB dan PDRB perkapita DIY serta PDRB dan PDRB perkapita setiap kabupaten/kota yang ada di DIY tersebut.

C. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang diatas, maka penulis akan mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana struktur perekonomian setiap kabupaten/kota di DIY tahun 2012-2015?
2. Apakah yang menjadi sektor unggulan setiap kabupaten/kota di DIY tahun 2012-2015?
3. Bagaimana klasifikasi kabupaten/kota di DIY berdasarkan typology klassen tahun 2012-2015?
4. Bagaimana dampak pertumbuhan sektor perekonomian di provinsi terhadap kabupaten/kota di DIY tahun 2012-2015?
5. Bagaimana dampak bauran industri kabupaten/kota di DIY tahun 2012-2015?
6. Sektor apa saja yang kompetitif untuk kabupaten/kota di DIY tahun 2012-2015?
7. Bagaimana perubahan sektor perekonomian kabupaten/kota di DIY tahun 2012-2015?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis struktur perekonomian kabupaten/kota di DIY tahun 2012-2015.
2. Menganalisis sektor unggulan pada tiap kabupaten/kota di DIY tahun 2012-2015.
3. Mengklasifikasikan gambaran pola dan struktur pertumbuhan pada tiap kabupaten/kota di DIY menggunakan typologi klassen tahun 2012-2015.
4. Menganalisis dampak pertumbuhan sektor perekonomian provinsi terhadap kabupaten/kota di DIY tahun 2012-2015.
5. Menganalisis bauran industri kabupaten/kota di DIY tahun 2012-2015.
6. Menganalisis sektor apa saja yang menjadi keunggulan kompetitif kabupaten/kota di DIY tahun 2012-2015.
7. Menganalisis perubahan sektor perekonomian kabupaten/kota di DIY tahun 2012-2015.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai keadaan perekonomian kabupaten/kota di DIY, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara praktik, diharapkan mampu memberikan informasi kepada pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang tepat terkait dengan masalah-masalah ketimpangan pendapatan, tingkat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan potensi sektor unggulan pada masing – masing kabupaten/kota.
2. Secara teoritis, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan teori terutama dalam hal perekonomian suatu daerah.